

Epilog: Program Makan Bergizi Gratis dan Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer

Lucinda¹

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ml.lucinda@uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Lucinda. (2026). Epilog: Program Makan Bergizi Gratis dan Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer. *Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY*, 12(1), 99-122.

ABSTRAK

Program MBG dari pemerintahan Prabowo bertujuan menyediakan makanan gratis bergizi untuk siswa sekolah di Indonesia dan mencegah stunting. Program ini mewujudkan janji kampanye Prabowo sehingga memberikan pembelajaran politik yang mencerahkan bagi bangsa Indonesia. Namun persiapan yang kurang matang dalam fasilitas, SDM dan dana menyebabkan banyak masalah sehingga memunculkan reaksi masyarakat. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memunculkan reaksi beragam karena dianggap terlalu menyederhanakan masalah kenakalan remaja. Barak militer identik dengan kekerasan, mengirim anak bermasalah ke sana bukan solusi untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja karena dianggap akan menghasilkan generasi kekerasan. Dua topik menarik ini dipilih sebagai topik survei.

Kata Kunci: Anak Bermasalah; Barak Militer; Program MBG.

ABSTRACT

MBG program from Prabowo government aims to provide free, nutritious meals to school children in Indonesia and prevent stunting. This program fulfills Prabowo's campaign promise, providing enlightening political learning for the Indonesian people. However, inadequate preparation in terms of facilities, human resources, and funding has caused numerous problems, sparking public backlash. West Java Governor Dedi Mulyadi's policy has also drawn reactions because it is considered an oversimplification of juvenile delinquency. Military barracks are synonymous with violence, sending troubled children there is not a solution to addressing the problem of juvenile delinquency, as it is thought to produce a generation of violence. These two interesting topics were chosen for the survey.

Keywords: Child Delinquency; MBG program; Military Barracks.

PENDAHULUAN

Kampanye calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 menampilkan dua program yang cukup menghebohkan. Dalam berbagai kesempatan kampanye di seluruh Indonesia dan melalui berbagai media, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menawarkan program makan siang gratis untuk 80 juta anak sekolah di Indonesia dan penyediaan 19 juta lapangan kerja. Dua program kerja ini menjadi program andalan yang menarik perhatian masyarakat. Dua program ini dianggap 2 paslon lainnya dan sebagian kritikus sebagai program yang terlalu berlebihan dan cenderung tidak masuk akal mengingat kondisi keuangan Indonesia (baca: APBN) yang tidak memungkinkan serta masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Meskipun awalnya dua program unggulan dari paslon Prabowo dan Gibran hanya dianggap sebagai janji manis untuk memenangkan pertarungan menuju kekuasaan, nyatanya janji kampanye ini mampu meyakinkan rakyat untuk memilih mereka. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan paslon nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Bahkan kemenangan Prabowo dan Gibran dalam satu putaran menunjukkan program kerja yang mereka tawarkan mampu merebut hati masyarakat yang membuat banyak anggota masyarakat memberikan suara untuk paslon ini. Dalam sejarah pilpres di Indonesia dengan peserta 3 paslon, belum ada paslon yang mampu menang satu putaran. Dalam Pilpres tahun 2009 dengan 3 paslon, pilpres harus dilaksanakan dengan dua putaran karena memang sulit sekali mendapatkan lebih dari 50% suara dalam satu putaran. Namun, dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo dan Gibran mampu mendapatkannya. Mengutip Kompas.com (21 Maret 2024), Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 20 Maret 2024 mengumumkan secara resmi pasangan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 setelah memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah. Diyakini banyak pihak bahwa alasan utama kemenangan paslon ini adalah karena janji kampanye mereka yang sangat menarik, yaitu program makan siang gratis dan penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan.

Setelah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada bulan Oktober 2024, pasangan Prabowo-Gibran berusaha keras mewujudkan realisasi program makan siang gratis yang sudah mereka janjikan dalam masa kampanye. Program makan siang gratis dari Prabowo-Gibran memiliki tujuan utama untuk menyediakan makanan bergizi gratis hingga mengatasi stunting. Program ini menjadi salah satu program andalan pemerintahan Prabowo untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas

2045. Walaupun banyak pihak mempertanyakan ketidakjelasan sumber dana untuk melaksanakan program ini, namun Prabowo tetap mantap untuk mewujudkannya. Dalam pelaksanaannya, program makan siang gratis telah berganti nama tiga kali. Yang pertama adalah program Makan Siang Gratis. Kemudian nama ini diganti menjadi Makan Siang dan Susu Gratis dan akhirnya diganti lagi menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG). Nama MBG inilah yang akhirnya digunakan secara resmi oleh pemerintah Prabowo-Gibran.

Pelaksanaan program MBG berada di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN) yang resmi didirikan pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Menurut artikel dari BGN tanggal 05 Januari 2025, BGN secara resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada tanggal 06 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah (<https://www.bgn.go.id>).

Sejak masa kampanye sampai dengan pelaksanaan awal dari program MBG, banyak sekali keraguan dan kritikan tentang perlu tidaknya program ini untuk anak-anak sekolah di Indonesia. Pro dan kontra terhadap program MBG ini tidak pernah berhenti. Keraguan tentang profesionalisme pelaksanaan dan efektivitas program, sumber dana yang dianggap mengambil jatah dana dari berbagai pos dalam APBN membuat topik MBG ini selalu hangat untuk didiskusikan dan diperdebatkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Berbagai diskusi dan perdebatan tiada henti inilah yang membuat mahasiswa Program Studi Sosiologi, FISIP UAJY yang mengambil mata kuliah Sosiologi Politik ingin melakukan mini survey sebagai tugas proyek untuk Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Tahun Ajaran 2024-2025.

Namun tidak semua mahasiswa ingin mengambil topik MBG ini. Dalam diskusi di kelas, ada dua topik yang sangat ingin disurvei mahasiswa. Hampir semua tim yang terbentuk ingin mengambil topik MBG sebagai topik survei mereka, namun ada satu tim yang sangat ingin melakukan survei untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pengiriman anak-anak bermasalah (baca: nakal) ke barak militer untuk didisiplinkan. Program pengiriman siswa “nakal” ke barak militer digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (biasa dipanggil Kang Dedi Mulyadi atau KDM) pada awal tahun 2025 sebagai reaksi maraknya kenakalan dan tindakan kriminal yang dilakukan remaja, terutama yang tergabung dalam geng motor. Namun program ini memunculkan polemik di tengah masyarakat. Kebijakan ini justru menuai kritik karena dinilai berisiko melanggar prinsip pendidikan dan hak-hak anak. Maraknya pemberitaan dan video tentang gagasan KDM di media sosial membuat satu tim

mahasiswa ingin tetap mengetahui pendapat masyarakat tentang program ini. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan berlandaskan semangat demokrasi, akhirnya diputuskan proyek survei untuk UAS mata kuliah Sosiologi Politik mengambil dua topik sekaligus, yaitu program MBG dan pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer.

PEMBAGIAN TIM DAN PENGUMPULAN DATA

Pembagian Tim Mahasiswa dan Kelompok Target Survei

Mini Survey dilakukan mahasiswa makul Sosiologi Politik untuk mengetahui pandangan beberapa kelompok masyarakat terhadap program MBG dan program pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer. Setiap tim mahasiswa terdiri dari 5-6 orang mahasiswa yang pemilihan anggotanya ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Setiap tim harus menentukan kelompok masyarakat yang menjadi target untuk diwawancarai pendapatnya dalam *mini survey* ini namun kelompok masyarakat yang dipilih setiap tim harus berbeda. Setiap mahasiswa wajib mewawancarai minimal dua orang informan yang masuk kategori kelompok masyarakat yang mereka pilih. Wawancara dilakukan mahasiswa pada bulan Juni 2025.

Dalam edisi *Working Papers* ini, terpilih lima tim yang memilih topik MBG dan satu tim yang memilih topik pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer. Berikut tabel berisi data tentang tim mahasiswa yang melakukan survei dan target survei mereka.

Tabel 1. Pembagian Tim dan Target Survei

No.	Kelompok Masyarakat yang Menjadi Subjek Survei	Anggota Tim Mahasiswa Makul Sosiologi Politik	NPM	Lokasi Wawancara
Topik: Program Makan Bergizi Gratis (MBG)				
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1. Agus Arya Yudhistira Mahendra 2. Christian Salomo Harimurti 3. Rasendriya Daffa Luthfi Ardhi 4. Yehezkiel Antonio Arruan Nongkang 5. Taufiq Suni Isnawan	221008098 221008117 221008125 221008134 221008136	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, DIY

No.	Kelompok Masyarakat yang Menjadi Subjek Survei	Anggota Tim Mahasiswa Makul Sosiologi Politik	NPM	Lokasi Wawancara
2.	Guru TK-SMA	1. Yosef Triyoga Saputra 2. Yoannes Bosco Teduh Suryo Febrian Asputra 3. Valentinus Renotri 4. Rayhan Abisakti 5. Yohanes De Brito Tegar Bagus Ananto	221007848 221007969 221008120 221008132 221008140	Kabupaten Sleman-DIY (luring), Sukabumi dan Tangerang (daring)
3.	Orang tua siswa penerima MBG	1. Putri Juwita 2. Herlin Beatrix Amanda Monim 3. Chelsea Galuh Setyaratri 4. Yulisa Delfiyani 5. Waila Sofia 6. Tamara Yolanda Sirait	221007825 221008037 221008101 221008121 221008135 221008152	Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (luring), dan via WA Video Call (daring)
4.	Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta	1. Dhaniel Rahmadin 2. Desal Atala Bagus Kurnia 3. Daniel Bakti Sianturi 4. Devanka Riske Mahendra 5. Dewanta Putra Surya Kusuma	211007672 221007970 221008036 221008073 221008044	Luring dan daring via WA Video Call dan Ms Teams)
5.	Pedagang Makanan depan SD	1. Primadani Novan Syahreal Purnawan 2. Atthahiya Brajawati Dwi Sasongko 3. Definely Annisa	221007961 221008129 221008110	Babarsari dan Kledokan, Kabupaten Sleman - DIY

No.	Kelompok Masyarakat yang Menjadi Subjek Survei	Anggota Tim Mahasiswa Makul Sosiologi Politik	NPM	Lokasi Wawancara
		Firdaus 4. Aurelia Ignasis Memet 5. Valada Ladzie Finalia 6. Rebecca Abigail	221007846 221008107 221007849	
Topik: Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer				
6.	Siswa SMA	1. Nicholas Alexander Djafar 2. Valentine Marcelyna 3. Estrella Rachellita 4. Darnifan Kristin Gulo 5. Agnes Marinda 6. Andre Sebastian Siahaan	201007463 221008013 221007817 221008116 221008038 221008045	WA Video Call Yogyakarta, Surakarta, Bandung, Merauke, Banda Aceh, Kab. Bengkalis Riau, Kab. Nias Sumut

Daftar Pertanyaan Mini Survey

Untuk kepentingan wawancara dengan informan, dosen pengampu dan mahasiswa berdiskusi di kelas untuk merumuskan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada masing-masing kelompok masyarakat yang menjadi target survei. Berhubung ada dua topik untuk survei ini, maka pertanyaan disiapkan terpisah, enam pertanyaan untuk masing-masing topik. Berikut adalah pertanyaan untuk dua topik survei ini.

Pertanyaan terkait topik Program MBG:

1. Apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari program MBG?
2. Siapa yang paling tepat menjadi target program MBG? Semua siswa SD sd SMA di seluruh Indonesia atau tidak? Apa alasannya?
3. Siapa yang diuntungkan dari program MBG? Siswa? Mitra atau vendor? Pemerintah? Pihak lain, siapa? Apa alasannya?



4. Menurut anda, mengapa bisa terjadi kasus keracunan dari program MBG?
5. Apakah program MBG perlu dihentikan karena kasus keracunan tersebut atau tetap perlu diteruskan? Apa alasannya?
6. Menurut anda, bagaimana dengan kualitas menu dan pelayanan dari penyedia MBG?

Pertanyaan terkait topik Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer:

1. Menurut anda, siapa saja yang dianggap sebagai anak bermasalah?
2. Apakah anak-anak bermasalah perlu dimasukkan ke barak militer untuk dididik menjadi baik? Apa alasannya?
3. Pendidikan militer seperti apa yang menurut anda cocok untuk mengatasi anak-anak bermasalah?
4. Bagaimana dengan pendidikan non militer untuk anak-anak bermasalah? Apakah tidak efektif?
5. Apakah cara ini (memasukkan anak bermasalah ke barak militer) dianggap mampu menyelesaikan masalah kenakalan remaja di Indonesia?
6. Menurut anda, siapa sebenarnya yang dianggap paling bertanggung jawab untuk mengatasi anak bermasalah? Apa alasannya?

TEMUAN MAHASISWA

Survei dilakukan kepada lima kelompok masyarakat untuk topik MBG, yaitu guru, pedagang kaki lima (PKL), orang tua siswa penerima MBG, pedagang makanan depan SD, dan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sementara satu tim dengan topik pengiriman anak bermasalah ke barak militer memilih siswa SMA dari beberapa kota untuk dimintai pendapat mereka. Survei dilakukan dengan dua metode wawancara yaitu wawancara secara langsung atau luring dan dengan wawancara daring melalui media WA *video call* atau Ms Teams. Penggunaan media Ms Teams untuk wawancara daring khusus dilakukan dengan mahasiswa UAJY yang memang memanfaatkan Ms Teams dalam proses pembelajaran mereka di universitas ini.

Selama melakukan survei, sebenarnya tidak ada informan yang menolak menjawab. Namun terdapat dua tim mahasiswa yang mengalami kesulitan dan tantangan tersendiri terkait dengan pemilihan target wawancara, yaitu tim dengan target orang tua siswa penerima MBG dan pedagang yang berdagang di depan SD.

Tantangan yang dialami tim mahasiswa dengan target orang tua penerima MBG adalah sebagai berikut. Pertama, kurangnya informasi tentang jadwal pulang siswa SD dan SMP menyebabkan tim mahasiswa sulit menjangkau orang tua secara langsung

pada waktu yang tepat. Ketika tim tiba di sekolah, banyak anak-anak sudah pulang, sehingga kesempatan bertemu dengan orang tua yang menjemput mereka pun terlewat. Kedua, sebagian besar orang tua (baca: ibu) datang ke sekolah hanya untuk menjemput anak dan langsung ingin pulang. Mereka biasa datang ke sekolah menjelang waktu pulang sekolah anak. Keterbatasan waktu ini menghambat proses wawancara yang seharusnya dilakukan dengan tenang dan mendalam. Selain itu, terdapat pula kendala dalam substansi jawaban. Beberapa ibu tidak memberikan jawaban yang sesuai atau relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap program MBG secara menyeluruh dan kurangnya informasi yang mereka terima tentang pelaksanaan MBG.

Sedangkan untuk tim mahasiswa yang memilih pedagang yang berjualan di depan SD, kesulitan yang dialami terkait dengan jawaban dari informan. Hal ini berkaitan dengan minimnya pengetahuan informan tentang program MBG itu sendiri. Banyak pedagang tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai kebijakan MBG. Ketidaktahuan ini menyebabkan respons yang diberikan sering kali bersifat umum, kurang relevan, atau tidak sesuai dengan fokus pertanyaan. Hal ini tentunya menyulitkan tim mahasiswa untuk menggali informasi yang dibutuhkan secara mendalam dan akurat. Selain itu, tantangan lain muncul dalam hal para pedagang yang cenderung memberikan jawaban singkat, terbatas, dan kurang terelaborasi. Menurut tim, kondisi ini terjadi mungkin karena para pedagang ini tidak terbiasa dengan situasi wawancara formal atau karena merasa kurang percaya diri dalam memberikan pendapat. Akibatnya sebagian besar pedagang hanya menjawab seperlunya tanpa memberikan penjelasan atau narasi yang rinci. Aspek waktu juga menjadi tantangan tersendiri. Pedagang di depan sekolah umumnya memiliki jadwal berdagang yang padat, terutama pada jam-jam sibuk seperti sebelum sekolah dimulai, saat istirahat, dan jam pulang sekolah. Aktivitas jual beli yang terus-menerus membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk diwawancarai secara mendalam. Bahkan ketika wawancara sedang berlangsung, tidak jarang mereka harus menghentikannya sejenak untuk melayani pembeli, yang berdampak pada terganggunya alur percakapan dan berkurangnya fokus dalam menjawab pertanyaan.

Namun lepas dari berbagai kesulitan dan tantangan di atas, semua tim mahasiswa berhasil mengumpulkan data. Berdasarkan hasil wawancara mahasiswa kepada anggota masyarakat dari lima kelompok dengan topik MBG, yaitu PKL, berikut adalah rangkuman dari pendapat anggota masyarakat tersebut:

1. Apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari program MBG?

Secara umum, informan dari semua kelompok target mengetahui tujuan dari program MBG, bahwa program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah dan pencegahan stunting. Program MBG ingin membekali anak-anak sekolah Indonesia dengan makanan sehat. Sedangkan manfaat Program MBG adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di sekolah, mendukung konsentrasi belajar anak, serta mengurangi beban ekonomi keluarga dalam hal penyediaan bekal sekolah anak yang bergizi. Namun ada informan dari kelompok mahasiswa UAJY yang berpendapat bahwa program ini sarat dengan kepentingan politik dan pencitraan pemerintahan Prabowo. Kelompok ini juga ingin agar program MBG (saat itu = tahun 2025) memperluas target program kepada ibu hamil dan menyusui, karena mereka termasuk kelompok rentan yang sangat menentukan kondisi gizi anak sejak masa kehamilan.

Menariknya, tim mahasiswa dengan target kelompok orang tua siswa penerima MBG menemukan fakta bahwa ada beberapa informan orang tua yang belum mengetahui bahwa program MBG memiliki tujuan yang lebih luas, seperti pencegahan stunting dan pembentukan pola makan sehat. Temuan yang hampir serupa ditemukan pada kelompok pedagang yang berjualan di depan SD. Tim mahasiswa menemukan bahwa para pedagang kurang memiliki cukup pengetahuan mengenai manfaat program MBG ini.

2. Siapa yang paling tepat menjadi target program MBG? Semua siswa SD sd SMA di seluruh Indonesia atau tidak? Apa alasannya?

Jawaban informan dari pertanyaan ini cukup beragam. Informan dari tiga kelompok masyarakat, yaitu PKL, guru, dan pedagang makanan di depan SD berpendapat bahwa siswa SD negeri di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di daerah pelosok atau terpencil, yang paling tepat menjadi target program MBG. Bahkan informan kelompok pedagang makanan di depan SD menilai bahwa program ini sebaiknya ditujukan untuk semua siswa agar terasa adil dan tidak menimbulkan kecemburuan. Namun, mereka juga menyadari bahwa pelaksanaannya di seluruh Indonesia memerlukan biaya yang sangat besar sehingga program ini bisa diawali dari jenjang SD. Anak-anak SD dinilai masih sangat membutuhkan perhatian khusus karena belum bisa menyiapkan makanan sendiri dan sedang berada dalam masa pertumbuhan. Jika nanti anggaran negara memungkinkan, program ini bisa dilanjutkan ke jenjang SMP dan SMA. Informan dari dua kelompok masyarakat lainnya, yaitu kelompok orang tua siswa penerima MBG dan mahasiswa UAJY berpendapat bahwa target program MBG harusnya semua siswa sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA karena

karena dapat membantu pemenuhan gizi dan meringankan beban orang tua, terutama jika anak sering lupa sarapan atau tidak mendapat makanan cukup di rumah.

Namun informan dari semua kelompok memiliki saran untuk target yang lebih tepat. Informan dari empat kelompok masyarakat, yaitu PKL, guru, mahasiswa UAJY dan orang tua siswa penerima MBG menyarankan perempuan hamil sebagai target program MBG jika orientasi MBG adalah pencegahan stunting. Pencegahan stunting seharusnya dilakukan sejak awal masa kehamilan. Bahkan informan dari kelompok orang tua siswa penerima MBG menyarankan agar lansia juga menjadi target program MBG namun dalam bentuk uang saku agar lebih fleksibel dan dapat dikelola oleh keluarga. Sementara informan mahasiswa UAJY, terutama mahasiswa dari program studi ilmu sosial menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa distribusi program ini juga harus menyasar daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti daerah dengan angka kemiskinan atau kekurangan gizi yang tinggi.

3. *Siapa yang diuntungkan dari program MBG? Siswa? Mitra atau vendor? Pemerintah? Pihak lain, siapa? Apa alasannya?*

Untuk pertanyaan tentang pihak yang diuntungkan dari program MBG, jawaban dari semua informan hampir sama, hanya urutannya yang berbeda. Informan dari kelompok PKL dan kelompok guru menjawab, pihak pertama yang diuntungkan adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah Prabowo-Gibran. Alasannya, terealisasinya program yang dikampanyekan dulu membuat pemerintah Prabowo tidak terbebani dengan janji politik mereka. Pihak selanjutnya yang diuntungkan menurut dua kelompok masyarakat ini adalah *vendor* atau pihak katering yang memperoleh keuntungan finansial karena semua pembiayaan dari awal sampai terdistribusinya MBG dibiayai oleh pemerintah.

Sementara bagi informan dari kelompok orang tua siswa penerima MBG, yang diuntungkan jelas adalah anak-anak sekolah karena anak-anak mendapatkan makanan gratis setiap hari di sekolah. Hal ini tidak hanya mengenyangkan tetapi juga membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Namun, belum ditemukan pernyataan tentang bagaimana makanan ini mempengaruhi gizi siswa. Pihak yang diuntungkan selanjutnya adalah *vendor* karena mendapat keuntungan dari pesanan makanan rutin setiap hari dan bahkan membuka peluang kerja. Namun kelompok masyarakat ini khawatir tentang proses penunjukan *vendor* yang dianggap tidak sepenuhnya transparan, dan berpotensi menjadi ajang distribusi kekuasaan, yang mana pemegang kekuasaan mendistribusikan proyek kepada pihak-pihak tertentu sebagai bentuk loyalitas politik atau balas budi atas dukungan

politik mereka di masa kampanye.

Informan dari kelompok mahasiswa UAJY juga menyebut pihak pertama yang diuntungkan adalah siswa sekolah, yang kedua adalah *vendor* serta yang ketiga adalah pemerintah. Siswa dinilai memperoleh manfaat langsung berupa asupan gizi secara gratis. *Vendor* mendapatkan keuntungan ekonomi dari pelaksanaan program MBG serta pemerintah diuntungkan karena citra politik mereka yang positif dari terlaksananya janji selama kampanye. Sementara informan dari kelompok pedagang makanan depan SD menyebutkan bahwa siswa sekolah adalah pihak pertama yang diuntungkan karena mereka bisa mendapatkan makanan gratis setiap hari. Berikutnya adalah orang tua sebagai pihak yang diuntungkan, terutama yang ekonominya pas-pasan. Yang terakhir adalah *vendor* yang diuntungkan karena mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan menyediakan MBG setiap hari.

4. Menurut anda, mengapa bisa terjadi kasus keracunan dari program MBG?

Jawaban atas pertanyaan ini cukup kritis dari sebagian besar informan. Mayoritas informan dari kelompok PKL, kelompok guru, dan kelompok mahasiswa UAJY menganggap kasus keracunan disebabkan karena tidak hadirnya lembaga pengawasan serta Standar Operasional Prosedur pada *vendor* atau katering. Selain itu tidak ada sertifikasi sehingga bahan baku makanan bisa jadi tidak segar dan tidak sehat. Keteledoran *vendor* dalam *quality control* seperti dalam menyiapkan bahan mentah, mengolah dan mendistribusikan makanan berdampak pada terjadinya siswa yang keracunan makanan. Informan mahasiswa juga menyoroti minimnya keterlibatan lembaga pengawas seperti BPOM atau Dinas Kesehatan sebagai penyebab terjadinya kasus keracunan makanan. Sebagian informan dari ketiga kelompok masyarakat ini juga mengkritisi pemangkasan anggaran untuk setiap porsi MBG, yang awalnya berkisar Rp. 15.000 menjadi Rp 10.000 dan terus berkurang menjadi Rp 8.000. Pemangkasan anggaran dianggap ketiga kelompok masyarakat ini membuat *vendor* terpaksa menekan biaya produksi dengan membeli bahan baku yang tidak layak.

Namun jawaban berbeda diberikan oleh kelompok orang tua siswa penerima MBG. Sebagian besar orang tua yang diwawancarai tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kasus keracunan dalam program MBG. Orang tua hanya menduga dari berita kasus keracunan yang mereka peroleh dari media atau dari pengalaman yang terjadi di lingkungan sekitar. Mereka umumnya tidak memiliki informasi mengenai proses pengolahan maupun distribusi makanan, sehingga hanya dapat memperkirakan penyebab keracunan berdasarkan asumsi mereka sendiri. Perhatian orang tua lebih terfokus pada kondisi makanan yang sampai kepada anak, seperti makanan yang

dianggap sudah tidak segar atau berpotensi basi ketika dikonsumsi. Namun ada beberapa orang tua yang menghubungkan kasus keracunan dengan aspek kebersihan dalam pengolahan makanan.

Jawaban dari informan pedagang makanan di depan SD mirip dengan jawaban dari tiga kelompok pertama di atas. Namun jawaban informan pedagang makanan ini lebih fokus kepada proses pengolahan dan distribusi makanan MBG. Menurut mereka, kasus keracunan dalam program MBG bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan dalam proses memasak dan distribusi makanan. Bisa jadi bahan makanan yang digunakan tidak segar, cara penyimpanannya kurang tepat, atau kebersihan dapur dan peralatan masak tidak terjaga. Selain itu, makanan yang harus disiapkan setiap hari jumlahnya besar sehingga kontrol kualitas jadi kurang maksimal. Hal-hal seperti ini bisa memicu makanan tercemar dan menyebabkan keracunan.

5. *Apakah program MBG perlu dihentikan karena kasus keracunan tersebut atau tetap perlu diteruskan? Apa alasannya?*

Jawaban mengejutkan datang dari informan kelompok PKL. Mayoritas informan PKL menolak program MBG dilanjutkan. Program MBG oleh mereka dianggap sebagai program “gagal” karena banyak merugikan siswa, *vendor* dan masyarakat (dengan banyaknya kasus keracunan) sehingga tidak layak dilanjutkan. Jika ingin tetap dilanjutkan, mereka mengusulkan agar dana MBG ini diberikan kepada masing-masing keluarga yang berhak untuk kemudian dananya dikelola sendiri dan makanannya dimasak sendiri.

Sementara informan dari kelompok guru, kelompok mahasiswa UAJY, kelompok orang tua siswa penerima MBG dan kelompok pedagang makanan di depan SD menilai program MBG tidak perlu dihentikan karena program ini memiliki tujuan yang sangat baik, yakni membantu anak-anak yang kurang mampu mendapatkan makanan bergizi, terutama anak-anak yang berada di daerah dengan akses terbatas kepada makanan bergizi. Menurut para guru yang diwawancarai, yang diperlukan adalah evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaannya, terutama dalam hal kontrol kualitas makanan dan pengawasan ketat terhadap *vendor* dalam proses penyiapan sampai distribusi makanan. Informan mahasiswa UAJY berpendapat pelaksanaan program MBG harus disertai dengan evaluasi dan perbaikan menyeluruh, terutama dalam hal pengawasan, pemilihan mitra, dan transparansi anggaran. Sekalipun sebagian informan mahasiswa setuju program MBG dilanjutkan, ada juga sejumlah mahasiswa yang menyarankan agar program ini dihentikan sementara, mengingat banyaknya persoalan teknis yang belum tertangani dan potensi pemborosan anggaran negara yang

terlalu besar.

Bagi orang tua siswa penerima MBG, program MBG tidak perlu dihentikan. Sebagian orang tua merasakan manfaat langsung dari program MBG ini, terutama dari kalangan ekonomi lemah. Mereka menilai program ini sangat membantu karena meringankan beban biaya makan dan mendukung kebutuhan gizi anak. Karena itu, program MBG tidak perlu dihentikan, tetapi perlu dievaluasi dan diperbaiki. Pengawasan mutu makanan harus diperketat, keterlibatan masyarakat ditingkatkan, dan transparansi dalam pelaksanaan dijaga agar program benar-benar aman, adil, dan tepat sasaran. Namun, mereka memberi catatan bahwa anggaran besar untuk MBG dinilai kurang efektif. Mereka mengusulkan agar dana dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih penting, seperti peningkatan kualitas pendidikan atau kesejahteraan guru. Sedangkan para pedagang makanan setuju program MBG dilanjutkan karena memiliki manfaat, terutama untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, pelaksanaannya perlu diawasi lebih ketat lagi, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan makanannya. Pemilihan penyedia makanan juga harus diseleksi dan dipertimbangkan dengan benar, tidak hanya berdasarkan harga murah, tetapi juga harus terjamin kualitasnya. Namun bila masalah keracunan terus berulang dan tidak ada perbaikan serta solusinya, mungkin lebih baik diberhentikan sementara.

6. Menurut anda, bagaimana dengan kualitas menu dan pelayanan dari penyedia MBG?

Untuk pertanyaan ini, tiga kelompok masyarakat yang diwawancarai, yaitu kelompok PKL, mahasiswa dan pedagang makanan di depan SD mengakui bahwa mereka belum pernah melihat secara langsung menu dan kualitas makanan MBG. Bahkan sebagian pedagang makanan di depan SD mengakui mereka tidak tahu kualitas menu atau makanan MBG sehingga tidak bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Namun mayoritas informan dari 3 kelompok ini mengetahui kualitas menu MBG yang buruk dan tidak layak konsumsi dari media massa atau media sosial. Demikian juga dengan informasi kualitas pelayanan dari penyedia MBG. Makanan yang basi, mentah, bahkan berulat menunjukkan pelayanan dari penyedia MBG masih kurang baik. Bahkan informan dari kelompok mahasiswa UAJY menilai makanan program MBG memiliki standar rendah, porsi terlalu kecil, dan menunya kurang variatif. Bahkan kelompok mahasiswa menganggap menu MBG belum memenuhi panduan gizi seimbang seperti konsep “Isi Piringku” dari Kementerian Kesehatan.

Sementara dua kelompok masyarakat lainnya, yaitu guru dan orang tua siswa penerima MBG memberikan penilaian berdasarkan pengalaman langsung mereka

dengan siswa di sekolah atau anak-anak mereka yang menerima MBG. Mayoritas guru menilai menu dan kualitas MBG awalnya cukup baik, dengan porsi dan nutrisi yang cukup. Namun seiring waktu, kualitas menu semakin menurun dan porsinya menjadi lebih sedikit. Menurut mereka, hal ini terjadi karena semakin banyak sekolah yang dilibatkan dalam program MBG sehingga pengawasan makanan terhadap SPPG menjadi lebih sulit. Apalagi dengan anggaran 10 ribu per porsi. Namun kualitas makanan juga bisa dipengaruhi oleh faktor seperti keterlambatan pengiriman dan kondisi bahan makanan yang kurang segar yang menyebabkan makanan berlendir atau basi. Informan dari kelompok orang tua siswa penerima MBG juga mengatakan bahwa makanan yang diterima oleh anak-anak cepat basi, porsinya kecil, rasa yang tidak sesuai dengan selera anak, atau menu yang terasa seperti makanan rumah sakit. Para orang tua juga khawatir karena kualitas makanan semakin menurun seiring waktu.

Secara umum, semua kelompok masyarakat tidak fokus untuk menjawab kualitas pelayanan dari penyedia atau katering MBG. Mereka lebih fokus pada kualitas menu yang banyak diberitakan di berbagai media atau yang mereka lihat sendiri. Namun dengan banyaknya berita negatif tentang makanan yang tidak layak konsumsi karena basi, belum matang, berulat, atau masih keras, mayoritas informan secara tidak langsung menunjuk kondisi ini sebagai penyebab keracunan pada siswa sekolah setelah menyantap MBG. Sebagai informasi, saat tim mahasiswa turun ke lapangan untuk melakukan wawancara pada bulan Juni 2025, sudah banyak kasus keracunan MBG yang menyebar lewat media massa dan media sosial.

Berikut ini rangkuman dari pertanyaan terkait topik Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer:

1. *Menurut anda, siapa saja yang dianggap sebagai anak bermasalah?*

Secara umum, jawaban siswa SMA untuk pertanyaan ini cukup mirip. Menurut siswa SMA, anak yang dianggap sebagai anak bermasalah adalah anak yang tidak mampu berperilaku sesuai dengan aturan, norma, etika, dan moral yang berlaku di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dalam keseharian mereka, anak bermasalah sering kali menunjukkan perilaku menyimpang atau merugikan, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Contohnya bolos sekolah, melawan atau membangkang pada guru atau orang tua, merokok, terlibat tawuran dan perundungan, menggunakan narkoba, serta terjerumus dalam pergaulan bebas. Namun para siswa ini juga mengatakan bahwa tidak semua anak yang berperilaku seperti di atas adalah “orang jahat” atau “orang yang bersalah” karena seringkali mereka hanya sedang mengalami

masalah psikologis, kesulitan perilaku, atau berasal dari keluarga yang disfungsi dan kurang mendapatkan perhatian serta kasih sayang.

2. Apakah anak-anak bermasalah perlu dimasukkan ke barak militer untuk dididik menjadi baik? Apa alasannya?

Jawaban untuk pertanyaan ini terbagi menjadi jawaban yang pro dan kontra. Siswa yang pro atau setuju menganggap barak militer dianggap mampu membentuk disiplin, tanggung jawab, dan memberikan efek jera bagi anak-anak yang sulit diarahkan oleh orang tua atau guru, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kenakalan seperti tawuran. Namun, siswa yang kontra menganggap ide KDM ini sangat diragukan efektivitasnya. Mereka berpendapat bahwa pendekatan militer tidak selalu tepat karena tidak semua masalah anak disebabkan oleh kurang disiplin, melainkan juga bisa berasal dari faktor keluarga, sosial, dan psikologis. Pendekatan yang keras dikhawatirkan mengabaikan hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang aman. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak-anak yang dianggap bermasalah seharusnya tidak semata-mata dengan hukuman atau stigma, melainkan juga melalui pendekatan yang lebih empatik dan suportif, agar mereka mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Contohnya adalah melalui pendidikan karakter, meningkatkan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta pendekatan psikologis yang dinilai lebih manusiawi dan kontekstual. Namun mereka yang menolak ide ini tetap berpendapat bahwa jika memang harus digunakan, sebaiknya pengiriman siswa ke barak militer menjadi pilihan terakhir dengan pertimbangan yang sangat matang.

3. Pendidikan militer seperti apa yang menurut anda cocok untuk mengatasi anak-anak bermasalah?

Menurut siswa SMA, pendidikan militer yang cocok bagi anak-anak bermasalah adalah pendidikan yang menekankan pada kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kerja sama, dan pembentukan karakter tanpa menggunakan pendekatan kekerasan. Pendidikan model ini misalnya kegiatan baris berbaris, pelatihan etika, konseling, serta kegiatan akademik yang terstruktur. Penekanan utama dari pendidikan militer ini bukan pada fisik yang keras, melainkan pembinaan yang manusiawi, tegas namun penuh empati. Kegiatan sehari-hari seperti bangun pagi, sarapan tepat waktu, olahraga, serta belajar mengatur waktu menjadi bagian dari latihan kedisiplinan. Pendekatan ini harus dilakukan secara sukarela, tidak memaksa, serta berbasis edukasi dan refleksi diri, bukan hukuman. Anak-anak bermasalah ini juga perlu diberikan bimbingan mental dan pemahaman tentang peran dan kewajiban mereka di lingkungan sosial, baik di sekolah

maupun di masyarakat.

4. *Bagaimana dengan pendidikan non militer untuk anak-anak bermasalah? Apakah tidak efektif?*

Pendekatan non militer dianggap sebagian siswa efektif dalam membentuk perilaku walau hasil ini tergantung pada situasi dan karakter anak. Namun beberapa siswa berpendapat bahwa pendekatan ini kurang efektif jika anak sudah mengetahui cara melawan, karena justru dapat memicu sikap yang lebih keras. Hal menarik, pendidikan non militer dianggap cukup efektif untuk generasi sebelum Gen Z, yang cenderung lebih menghormati figur otoritas seperti mentor. Ada pula pandangan yang menilai bahwa efektivitasnya sangat tergantung pada karakter masing-masing anak. Beberapa siswa meyakini pendekatan non militer masih bisa berhasil jika dikombinasikan dengan metode konseling dan terapi. Namun bagi siswa lain, pendekatan non militer ini dianggap kurang efektif karena anak masih bisa melawan walau menurut mereka lingkungan yang baik dapat membentuk perilaku anak yang baik. Secara keseluruhan, pendekatan non militer cenderung lebih efektif dalam jangka panjang apabila disertai dengan dukungan konseling dan terapi yang berkelanjutan.

5. *Apakah cara ini (memasukkan anak bermasalah ke barak militer) dianggap mampu menyelesaikan masalah kenakalan remaja di Indonesia?*

Mayoritas siswa berpendapat bahwa memasukkan anak bermasalah ke barak militer tidak bisa menyelesaikan kenakalan remaja di Indonesia. Alasannya, karena saat mereka dididik dalam barak militer, efek jeranya hanya sementara atau bersifat jangka pendek, mungkin setelah mereka keluar dari barak mereka akan kembali pada kebiasaan buruknya lagi. Pendidikan militer di barak tidak langsung menyentuh akar masalah yang dialami para remaja bermasalah ini. Menurut mayoritas siswa, masalah kenakalan remaja di Indonesia memerlukan solusi yang lebih komprehensif dan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Mereka juga menilai bahwa pendekatan karakter sangat penting. Banyak faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah faktor lingkungan dan pertemanan sehingga program barak militer yang hanya berlangsung 2 minggu tidak akan bisa menuntaskan akar permasalahan dan menyelesaikan kenakalan remaja di Indonesia.

6. *Menurut Anda, siapa sebenarnya yang dianggap paling bertanggung jawab untuk mengatasi anak bermasalah? Apa alasannya?*

Mayoritas siswa SMA sepakat bahwa orang tua adalah pihak yang paling

bertanggung jawab dalam mengatasi anak bermasalah karena keluarga merupakan lingkungan terdekat anak, tempat pertama anak belajar nilai, kasih sayang, dan perilaku. Pembentukan karakter awal juga dimulai dari keluarga. Banyak perilaku bermasalah pada anak dianggap berasal dari kurangnya perhatian atau pola asuh yang tidak tepat di rumah. Namun beberapa siswa juga menekankan pentingnya peran sekolah, masyarakat, dan bahkan pemerintah dalam menangani masalah anak secara lebih menyeluruh. Semua pihak seharusnya saling bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendidik bagi anak.

PEMBAHASAN

Program MBG sebagai “program emas” pasangan Prabowo-Gibran sudah diketahui oleh banyak masyarakat Indonesia. Walau awalnya diyakini program MBG hanya janji manis untuk memenangkan Pilpres 2024, informasi tentang program ini menyebar cepat lewat media massa dan media sosial. Setelah Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kepercayaan terhadap program ini semakin menguat karena MBG benar-benar direalisasikan. Awalnya hanya sekedar pengetahuan tentang program yang dikampanyekan ini kemudian menguat menjadi kepercayaan kepada pemerintah Prabowo saat janji kampanye ini diwujudkan menjadi program nyata. Program MBG yang diwujudkan ini menguatkan posisi pemerintah Prabowo sebagai pemimpin yang menepati janji kampanyenya, hal yang sangat langka terjadi dalam pentas politik di Indonesia. Perwujudan nyata janji kampanye lewat program MBG ini memperkuat sikap politik masyarakat (pendukung maupun non-pendukung) untuk tetap mendukung program ini dilanjutkan dengan berbagai catatan. Semua ini mendukung pandangan A. Thio tentang sosialisasi politik. Program MBG bisa dikaitkan dengan pendapat A. Thio dalam bukunya *Sociology: An Introduction* yang mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah “proses dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap politik” (dalam Damsar: 2010, 153).

Walaupun sudah berjalan satu setengah tahun, program MBG sampai saat ini masih memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat ini muncul sebagian besar diakibatkan oleh berbagai berita dari media cetak dan media sosial tentang siswa yang keracunan setelah mengonsumsi MBG. Menurut data KPAI, sepanjang tahun 2025 saja, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 12.658 anak di 38 provinsi terkonfirmasi keracunan. Data dari KPAI ini belum termasuk data awal sampai pertengahan tahun 2026. Sedangkan dari hasil monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal tahun 2025

hingga April 2026, setidaknya terdapat 33.626 pelajar di Indonesia dari 31 provinsi yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG. Hasil monitoring JPPI ini bersumber dari laporan medis. Data korban keracunan diverifikasi langsung melalui catatan medis puskesmas, RSUD, dan rilis resmi dinas kesehatan di tiap wilayah terdampak (*Kompas.id*. 09 April 2026).

Sementara itu, mengutip informasi dari beberapa media nasional, Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 446 kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan akumulasi mencapai 37.693 korban sejak awal implementasi pada Januari 2025 hingga awal Mei 2026. Kasus ini mendominasi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Lampung. Sementara itu, media *tempodotco* melaporkan sebanyak 293 kasus terjadi di satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG yang belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Dari 27 ribu lebih dapur MBG yang telah beroperasi, hampir 12 ribu dapur ternyata belum memiliki SLHS.

Mengutip berbagai sumber, hasil investigasi dari Dinas Kesehatan, BPOM, dan jaringan pemantau pendidikan menunjukkan bahwa tingginya angka keracunan disebabkan oleh beberapa faktor teknis berikut:

1. Mayoritas SPPG tidak memiliki sertifikasi SLHS. Menurut data dari Indonesia Environment & Energy Center tanggal 17 April 2026, banyak dapur beroperasi tanpa jaminan resmi bahwa makanan yang mereka sajikan bebas dari kontaminasi. Akibatnya, mayoritas kasus keracunan terbukti bersumber dari dapur tanpa sertifikasi ini.
2. Pelanggaran SOP & Alat Pelindung Diri (APD): Temuan CCTV di beberapa dapur menunjukkan penjamah makanan tidak menggunakan APD standar saat mengolah bahan masakan.
3. Rantai Dingin (*Cold Chain*) yang buruk: Bahan makanan berisiko tinggi seperti daging ayam segar diterima pada malam hari, tetapi baru mulai dimasak dini hari berikutnya tanpa disimpan dalam fasilitas pembeku (*freezer*) yang memadai, memicu multiplikasi bakteri berbahaya seperti *Salmonella*. Penyebab ini yang membuat lauk ayam yang disajikan menjadi basi atau berbau, bahkan ditenggarai menyebabkan keracunan pada siswa yang mengonsumsinya.
4. Kelebihan Kapasitas Produksi: Target pengolahan yang menyentuh 3.000 porsi per SPPG dinilai para ahli melebihi batas kapasitas kontrol kebersihan dapur lokal. (*tempodotco*)

Sanksi yang sudah dilakukan pemerintah kepada SPPG yang bermasalah tata kelolanya dalam menyiapkan MBG berupa penutupan permanen atau pencabutan izin usaha untuk SPPG yang terbukti lalai. Bahkan pemerintah Prabowo mencopot Kepala BGN lama karena terbukti melakukan korupsi dan menggantinya dengan pejabat baru. Bahkan demi menjaga kualitas pelaksanaan program MBG, hingga Senin tanggal 03 Agustus 2026, sebanyak 137 Kepala SPPG di berbagai daerah di Indonesia dicopot dari jabatannya (Detik.com, 04-08-2026). Pergantian Kepala BGN dan pencopotan jabatan ratusan Kepala SPPG yang bermasalah menunjukkan pemerintahan Prabowo sungguh-sungguh ingin meneruskan program MBG dengan memperbaiki kualitas dan manajemen program di semua lini, bukan menghentikan program ini seperti yang diinginkan banyak pihak.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem sosial dan sistem politik (Damsar: 2010, 207-208). Dalam hal ini, informasi program MBG dikomunikasikan dengan sangat baik sebagai salah satu program unggulan pasangan Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Pesan ini tersampaikan dengan sangat jelas dan baik dari pasangan capres dan cawapres saat itu (yang berada dalam sistem politik) kepada penerima pesan yaitu rakyat (yang berada dalam sistem sosial) yang kemudian memahaminya sebagai program yang luar biasa. Setelah pasangan Prabowo-Gibran terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, mereka kemudian mewujudkannya awal Januari 2025. Kekonsistenan sikap politik pemerintah Prabowo-Gibran mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada masyarakat tentang komitmen dan kejujuran janji kampanye mereka sehingga di awal pelaksanaan program MBG, mayoritas masyarakat sangat mendukungnya.

Namun berbagai masalah yang muncul dari program MBG seperti semakin banyak siswa yang keracunan, kualitas makanan yang buruk bahkan basi, korupsi oleh pejabat di BGN dan di SPPG serta manajemen pelayanan yang buruk menjadi semacam pesan yang dikirimkan kepada masyarakat sehingga mulai muncul usulan untuk menghentikan program MBG ini, apalagi dana MBG yang besar sampai menggerogoti APBN negara Indonesia. Sikap keras untuk menghentikan program MBG ini muncul terutama dari informan PKL dan dari Sebagian kecil informan kelompok mahasiswa UAJY dan guru. Tidak bisa dipungkiri bahwa berita-berita buruk tentang program MBG di media massa dan media sosial (tentang kualitas makanan dan manajemen pelaksanaannya serta korupsi oleh para pejabat pelaksanaannya) telah menjadi pesan negatif yang diterima oleh masyarakat sehingga muncul sikap kontra kepada pembuat

kebijakan (baca: pemberi pesan) yaitu pemerintah. Komunikasi politik dalam bentuk dua arah ini masih berjalan terus sampai saat ini karena program MBG masih berlangsung. Komunikasi dua arah atau dialog ini juga menunjukkan adanya model komunikasi politik berupa model interaksi. Model interaksi dalam komunikasi politik menunjukkan komunikasi berlangsung sebagai sebuah proses aksi reaksi yang dinamis yang diantarai oleh adanya interpretasi atau proses pemaknaan dari penerima pesan (yaitu masyarakat) terhadap program MBG (sebagai pesan) yang disampaikan pemerintah Prabowo (sebagai sumber atau pemberi pesan) (Damsar: 2010, 218-219).

Satu hal menarik ditemukan dari analisis tiga tim mahasiswa yang menganggap bahwa program MBG sebenarnya menjadi satu bentuk keberhasilan pemerintah Prabowo menghegemoni masyarakat Indonesia. Konsep hegemoni adalah konsep yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya. Bagi Gramsci, hegemoni akan terus berlangsung jika cara berpikir, cara hidup, dan pemikiran masyarakat bawah telah meniru dan menerima cara berpikir dan gaya hidup dari kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Hegemoni tidak hanya menggunakan dominasi kekuasaan tapi juga dengan ideologi yang disebarkan melalui berbagai pembiasaan dalam masyarakat (Suyanto: 2018, 2-3). Mengikuti pandangan Gramsci, hegemoni merujuk pada kondisi yang mana sebuah kelompok sosial, seperti oligarki dan kapitalis, memegang kekuasaan. Namun, kekuasaan yang diperoleh kelompok ini tidak menggunakan kekerasan fisik melalui polisi atau militer secara represif melainkan berasal dari kontrol hegemonik yang mereka miliki. Dengan demikian, hegemoni dipahami sebagai cara suatu kelompok sosial memperoleh pengaruh (kekuasaan) melalui persuasi, dengan menggiring kelompok sosial lain (yang dikuasai) untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka, seolah-olah secara sukarela, tanpa paksaan. Analisis dari tiga tim mahasiswa menilai program MBG merupakan bentuk hegemoni negara, yang mana kebijakan MBG dikemas seolah-olah demi kepentingan rakyat, namun di baliknyanya terdapat upaya negara untuk mempertahankan kekuasaan melalui pengaruh ideologis. Retorika seputar gizi dan *stunting* yang adalah tujuan MBG menjadi cara negara membentuk opini (bahkan kepercayaan) publik agar mendukung program ini.

Tentunya klaim adanya hegemoni di atas tidak sepenuhnya tepat karena kritik terhadap program MBG dari berbagai elemen masyarakat sudah bermunculan sejak awal pelaksanaannya di awal 2025. Berbagai kritik sampai tuntutan untuk menghentikan program MBG sebenarnya menunjukkan adanya ruang partisipasi politik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan temuan tim mahasiswa untuk

informan dari kelompok orang tua siswa penerima MBG menunjukkan bahwa orang tua sangat kritis melihat program MBG sebagai salah satu proyek balas budi dari pemerintah kepada parpol koalisi atau pihak-pihak yang dulu mendukung mereka. Kemudian mayoritas informan dari kelompok mahasiswa juga mengkritisi potensi keuntungan besar yang diperoleh pemerintah dari sisi pencitraan politik serta *vendor* dari sisi ekonomi. Tidak sedikit yang mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dana program MBG yang sangat besar. Sekalipun kebijakan MBG sejak awal tidak melibatkan masyarakat, namun respons negatif terhadap program ini sampai kepada pemerintah sehingga pemerintah melakukan beberapa perubahan dan perbaikan. Artinya kritik dan masukan dari masyarakat membuat pemerintah mengevaluasi kebijakan MBG ini dan berusaha memperbaikinya. Keterlibatan masyarakat lewat dukungan, kritik atau saran terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah (Handoyo: 2013, 248). Dalam hal ini, masyarakat sebagai warganegara atau pribadi telah menyuarakan pendapat mereka terhadap program MBG, baik yang mendukung maupun yang memberikan kritik bahkan seruan untuk menghentikan program MBG. Semua tindakan ini adalah bagian dari partisipasi politik.

Beralih ke topik pengiriman anak bermasalah ke barak militer. Menarik untuk melihat pandangan para siswa tentang anak-anak bermasalah yang dikirim ke barak militer. Pendapat mereka cukup bijak dengan mempertimbangkan banyak sisi, tidak hanya sekedar setuju atau tidak setuju. Namun dapat disimpulkan bahwa pendidikan militer bukanlah solusi untuk mengatasi atau menyelesaikan kenakalan anak-anak atau remaja. Yang penting adalah mencari akar masalah yang menyebabkan anak-anak bertingkah laku yang melanggar sistem atau norma sosial. Para siswa SMA yang diwawancarai menyadari bahwa keluarga adalah yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, termasuk pendidikan karakternya. Sebagai lingkungan paling awal dari anak, keluarga menjadi titik awal pertumbuhan anak sehingga peran orang tua dalam membentuk karakter dan perilaku anak menjadi sangat penting. Orang tua-lah yang berperan mengajari anak-anak bagaimana harus berperilaku dalam masyarakat, harus menghormati tata nilai dan moral masyarakat. Keluarga sebagai garda terdepan dalam penanaman nilai, termasuk nilai-nilai politik. Dalam konsep sosialisasi politik, keluarga adalah agen pertama dalam menanamkan nilai-nilai politik seperti menghormati sistem atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat, menghormati orang

lain, berperilaku tertib.

Hal di atas sejalan dengan pengertian sosialisasi politik menurut Gabriel A. Almond, bahwa sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yg menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anak-anak, sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap dan harapan politik yang hidup dlm masyarakatnya, termasuk di dalamnya berbagai aturan, nilai dan norma sosial (Damsar: 2010, 178). Dalam sosialisasi politik, penanaman nilai-nilai politik lebih umum dilakukan dengan non kekerasan. Namun sosialisasi nilai politik ini sangat mungkin dilakukan dengan cara represif atau dengan cara kekerasan. Dalam pandangan para siswa, pendidikan ala barak militer bisa dianggap sebagai sosialisasi politik represif karena nilai-nilai masyarakat ditanamkan secara militer yang identik dengan disiplin dan kekerasan.

Selain itu, yang tidak boleh diabaikan adalah pendapat pakar pendidikan dan psikolog anak yang sangat khawatir dengan pendidikan represif ala militer yang diusung KDM ini. Pernyataan mereka tentang pelanggaran hak anak terkait dengan tumbuh kembang anak dalam suasana yang aman dan nyaman tidak akan tercapai dengan gaya militer. Pendidikan militer, walau hanya sebentar, dapat pula menimbulkan trauma psikologis pada anak yang mengalaminya. Ke depannya, trauma ini dapat berwujud tindakan kekerasan yang dilakukan pada pihak lain sehingga persoalan sebelumnya belum selesai malah memunculkan masalah baru. Akar kekerasan harusnya dihilangkan dalam mendidik anak. Mendidik anak dengan kekerasan akan melahirkan kekerasan di kemudian hari. Hal ini juga sejalan dengan sosialisasi nilai politik, bila nilai yang diajarkan adalah nilai yang tidak baik (kekerasan), maka hasilnya pun adalah sesuatu yang tidak baik (kekerasan).

PENUTUP

Janji kampanye dalam sebuah pemilihan sangat layak untuk direalisasi sebagai bukti bahwa program yang ditawarkan kepada calon pemilih bukanlah janji manis yang hanya bertujuan untuk menarik suara. Selama ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa menerima janji-janji manis kampanye yang kemudian menguap begitu saja setelah calon pejabat terpilih dan menduduki kekuasaan. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh pasangan Prabowo-Gibran yang berkali-kali meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa program MBG yang menjadi program unggulan mereka pasti akan direalisasikan jika mereka terpilih. Janji ini nyata dan program MBG benar-benar dilaksanakan. Namun seperti setiap hal yang dipersiapkan terburu-buru tanpa persiapan dan perhitungan

matang, program MBG yang mulai direalisasikan awal 2025 mengalami banyak masalah, dari kualitas makanan yang buruk, distribusi yang terlambat, siswa yang keracunan makanan, SPPG yang curang sampai korupsi anggaran yang dilakukan oleh pejabat publik maupun oleh pemilik *vendor* atau catering MBG. Semua ini perlu menjadi pembelajaran bahwa program yang bertujuan baik perlu dipersiapkan secara matang dan juga memperhatikan kesiapan SDM dan anggaran. Tidak perlu memaksakan diri untuk segera merealisasikan program yang dijanjikan, lebih baik sedikit terlambat namun bisa melaksanakannya dengan lebih baik.

Di sisi lain, keinginan KDM untuk membantu mengatasi masalah kenakalan remaja di Jawa Barat adalah hal yang baik. Namun keputusan pribadi tanpa melibatkan anggota DPRD Jawa Barat, pakai pendidikan dan psikolog anak menjadi catatan tersendiri. Pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer untuk didisiplinkan dan dibentuk karakternya menjadi pribadi yang lebih baik menyiratkan bahwa cara militer dianggap menjadi solusi tepat dan cepat untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja di Jawa Barat. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah hak anak untuk berkembang dalam kondisi dan suasana aman dan nyaman, yang sulit ditemukan dalam pendidikan militer di barak militer. Kekhawatiran terbesar adalah pendidikan militer yang sarat dengan kekerasan akan menghasilkan generasi yang cenderung bertindak dengan kekerasan di masa depan. Apalagi anak-anak yang bermasalah yang dikirim ke barak militer mayoritas adalah anak-anak setingkat SMA yang masih labil psikologisnya. Kritikan dari kalangan pendidik dan para ahli (khususnya psikolog anak dan remaja) harus menjadi perhatian. Jangan sampai solusi sesaat malah menghasilkan generasi bermental kekerasan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- BGN. (2025). *BGN akan Memulai Program MBG Secara Bertahap* (05 Januari 2025) dari <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-secara-bertahap>, diakses 20-07-2026.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Detik.com. (2026). *BGN Copot 137 Kepala SPPG Terkait Kejadian Fatal dan Penyimpangan* dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8603254/bgn-copot-137-kepala-sppg-terkait-kejadian-fatal-dan-penyimpangan>, diakses 04-08-2026.
- Duverger, Duverger (2005). *Sosiologi Politik* (terjemahan)
- Handoyo, Eko. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Indonesia Environment & Energy Center. (2026). *Ternyata Baru 198 dari 10.012 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Higien, Mengapa Sertifikat Ini Penting?* dari <https://environment-indonesia.com/sertifikat-higien-dapur-mbg/>, diakses 20-07-2026.
- Kompas.id. (2026). *Sejak 2025, Sebanyak 33.626 Pelajar Jadi Korban Keracunan MBG* dalam <https://www.kompas.id/artikel/sejak-2025-sebanyak-33626-pelajar-jadi-korban-keracunan-mbg>, diakses 25-07-2026.
- Nash, Kate. 2010. *Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics, and Power*. John Wiley & Sons.
- Rush, Michael dan Phillip Althop (2007). *Pengantar Sosiologi Politik* (terjemahan).
- Salim, Kamaruddin dan Efriza (2019). *Sosiologi Politik, Sejarah, Analisis, dan Dinamika Perkembangan Konsep*. Malang: Intrans Publishing.
- Suyanto, Bagong dkk (2018). *Memahami Teori Sosial*. Surabaya: Unair Press.
- Tempodotco (2026). <https://www.instagram.com/reel/DYQdSwlPKXU/>, diakses 25-07-2026